

# SESUDAH 50 TAHUN KITA HARUS BERANI MENGHADAP APA YANG TERJADI<sup>1</sup>

Franz Magnis-Suseno

## Abstract

*The author gives a personal account of the 1965/1966 mass slaughter of so-called communists in central Java where he was living at the time, and more generally in Sumatra, Java and Bali. He continues with a detailed analysis. He then calls for fellow Indonesians to face up to the truth of the massacre, which until now has been erased from the collective historical memory of the nation.*

**Kata-kata kunci:** historical truth, Indonesian Communist Party, General Suharto, Accepting Responsibility, Reconciliation.

Kita mendekati genap 50 tahun sejak di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta suatu gerakan yang menamakan diri “Gerakan 30 September” (sebutan yang akan saya pakai, disingkat G30S) membunuh secara brutal enam jenderal dan kapten Tendean dan membentuk suatu Dewan Revolusi sebagai penguasa tertinggi di Indonesia. Dewan Revolusi juga berhasil dibentuk di Surakarta dan di Yogyakarta di mana mereka membunuh komandan Korem Kolonel Katamso dan stafnya Letkol Sugiono.

Tak berlebihan, peristiwa itu merupakan peristiwa paling menentukan dan paling traumatis dalam sejarah Indonesia Merdeka. Dari tanggal 1 Oktober itu lepaslah suatu dinamika yang bermuara dalam suatu orgasme pembalasan berupa pengejaran, penyiksaan, pembunuhan dan

---

<sup>1</sup> Paper ini dibawakan dalam seminar “Tinjauan Etis Tentang Penyelesaian Kasus Tahun 1965” di STFK Ledalero pada 19 September 2015.

penghancuran sosial puluhan juta warga bangsa yang akan termasuk salah satu kejahatan genosidal paling mengerikan terhadap hak-hak asasi manusia di bagian kedua abad ke-20.

Selama 50 tahun peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 dengan buntutnya yang sedemikian mengerikan itu tidak dapat dibicarakan secara terbuka. Sekarang saja, begitu kita diperingatkan oleh Ketua MPR Fadli Son, pembicaraan harus dengan bijaksana dan hati-hati kalau tidak mau berakhir dalam kegagalan.

Akan tetapi kita harus membicarakannya. Dengan berhati-hati, iya, tetapi juga dengan jujur. Kita harus bertanya bagaimana kekejaman di luar segala ukuran terhadap bangsa kita sendiri menjadi mungkin. Tak lain demi integritas dan harga diri kita sendiri. Bangsa Indonesia tidak dapat untuk selamanya lari dari sejarahnya.

## **Mengapa?**

Masalahnya bukan apakah PKI berada di belakang G30S atau tidak (mengikuti a. l. John Roosa<sup>2</sup>, saya sendiri tidak meragukan suatu keterlibatan Ketua PKI D.N. Aidit dan beberapa pimpinan lain PKI). Masalahnya adalah: Mengapa tidak cukup kalau PKI dilarang dan dibubarkan saja? Mengapa sampai sejuta rakyat (bisa lebih) mesti dibunuh? Betul, Presiden Sukarno menolak tindakan terhadap PKI. Tetapi pada akhir Oktober 1965 PKI sudah tidak berdaya sama sekali.

Mengapa pada waktu PKI sudah lumpuh desa-desa dan kota-kota, mulai dari Jawa Tengah sampai ke seluruh pelosok tanah air, secara sistematis disisir, masyarakat yang dianggap PKI atau dekat PKI ada yang langsung dieksekusi, ada yang dicituk dulu, ditahan, tetapi kemudian, biasanya pada malam hari, dibawa ke tempat-tempat sepi dan dibunuh di sana (Sarwo Edhie menyebutkan angka tiga juta orang yang dibunuh, kiranya angka yang terlalu besar). Padahal pembunuhan-pembunuhan itu bukan pengeroyokan spontan oleh masyarakat yang emosional, melainkan dilakukan dengan kepala dingin, dengan persiapan administratif!

---

<sup>2</sup> John Roosa, *Pretext for Mass Murder. The September 30<sup>th</sup> Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia* (The University of Wisconsin Press, 2006).

Lebih banyak orang lagi yang ditahan (menurut Sudomo seluruhnya 1,9 juta). Mereka dikategorikan ke dalam golongan A (yang kemudian dibawa ke pengadilan), golongan B (yang dianggap orang penting, tetapi karena tidak melakukan sesuatu yang bisa dituduhkan kepada mereka, mereka ditahan begitu saja), dan golongan C yang kemudian dilepaskan lagi.

Namun mereka yang dilepaskan tidak dapat kembali ke suatu kehidupan normal. Karena mereka sudah dicap “terlibat Gestapu/PKI”, di tempat kerja lama mereka ditolak, sering rumah sudah diambil alih orang lain. Paling gawat, pemerintahan Soeharto menetapkan sederetan peraturan dan “kebijakan” yang menstigmatisasi lebih dari sepuluh juta saudara dan saudari kita sebagai “terlibat” atau “tidak bersih lingkungan”, dalam masyarakat mereka dicap “PKI” dan diasingkan dari pergaulan normal, banyak yang kehilangan nafkah hidup, tempat kerja tertentu tertutup bagi mereka, yang pegawai negeri dipecat.

Ratusan ribu orang golongan B ditahan lebih dari sepuluh tahun tanpa proses pengadilan, mereka sering disiksa, perempuan-perempuan diperkosa. Puluhan ribu tahanan dibuang ke pulau Buru yang menjadi kam konsentrasi raksasa, hidup mereka dalam kondisi tidak manusiawi. Semua jutaan saudara-saudari kita itu hancur secara sosial.

## **Tiga Tahap**

Mengapa itu sampai terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab? Di sini bukan tempat untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Akan tetapi pertanyaan tentang tanggung jawab harus diajukan. Untuk menangani pertanyaan itu, sebaiknya kita membedakan tiga tahap.

Yang pertama adalah kejadian-kejadian tanggal 1 Oktober 1965 dan buntutnya yang langsung. Saya tidak akan masuk ke dalam spekulasi tentang siapa „dalang“ G30S. Yang jelas, pada hari itu pagi-pagi enam jenderal tinggi Angkatan Darat dan ajudan Kapten Pierre Tandeau diculik dan dibunuh. Gerakan itu di Jakarta sudah dipatahkan pada malam hari yang sama dan berakhir, sesudah benteng-bentengnya di Solo dan Yogya

menyerah. Untuk mematahkan PKI secara definitif, sebenarnya cukup kalau PKI - yang tidak memperlihatkan kemampuan melawan - dilarang, dengan, barangkali, para kader inti ditahan dulu, serta semua yang betul-betul terlibat dalam penculikan dan pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta dibawa ke pengadilan. PKI pasti tidak akan bisa bangkit lagi.

Namun larangan tidak turun. Di pertengahan Oktober 1965 mulai tahap kedua, tahap paling mengerikan. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah pembersihan-pembersihan dilakukan RPKAD, tidak ada pembunuhan spontan oleh masyarakat. Pembunuhan-pembunuhan dalam jumlah yang betul-betul di luar segala imajinasi terjadi di Jawa Timur, di Bali, tetapi juga misalnya di Flores, dan melibatkan masyarakat non-militer.<sup>3</sup>

Siapa yang bertanggung jawab? Apakah Suharto memerintahkannya? Apakah dibiarkan berlangsung tanpa ada perintah apa pun? Andaikata PKI langsung dilarang, apakah pembunuhan mengerikan itu barangkali tidak terjadi? Tak ada jawaban. Tak ada jawaban juga mengapa bangsa Indonesia terlibat dalam sesuatu yang sedemikian tidak manusiawi!

Akan tetapi tak ada keragu-raguan sedikit pun bahwa Suharto dan jenderal-jenderal pembantunya bertanggung jawab seratus persen atas kejahatan-kejahatan tahap ketiga: Penangkapan jutaan orang sebagai „terlibat“ di mana hanya satu hal pasti, yaitu bahwa mereka *tidak* terlibat dalam arti apa pun. Secara sistematis dan birokratis jutaan saudara dan saudari sebangsa dikeluarkan dari komunitas solidaritas bangsa, dihancurkan nama baiknya, dirusak keluarga dan perekonomiannya, banyak yang disiksa, perempuan diperkosa, difitnah, dirampas kebebasannya. Yaitu mereka yang dianggap “terlibat”, dengan anak dan cucu mereka, serta mereka yang “tidak bersih lingkungan”.

Yang golongan “C”, meski cukup cepat dilepaskan, tetap terkena stigmatisasi, ada tanda di KTP (ET, eks-tapol), pekerjaan tertentu tertutup bagi mereka, mereka harus secara teratur lapor, anak-anak mereka susah masuk sekolah. Puluhan ribu dimasukkan ke dalam kategori “B”, meski

3 Pembunuhan-pembunuhan itu termasuk lima genosida besar di bagian kedua abad ke-20; yang empat lain: puluhan juta korban „loncatan besar ke depan“ Mao Zedong, 2 juta orang di Kamboja, 800.000 di Ruanda, sekurang-kurangnya 150.000 – dari seluruh penduduk 650.000 – di Timor Timur (kita lagi!).

tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum, namun dianggap rada penting, ditahan dalam kam-kam khusus, termasuk di pulau Buru. Sisa sebanyak puluhan ribu baru dilepaskan di sekitar 1979 atas desakan presiden AS Jimmy Carter.

Tak jelas mengapa kejahatan itu dilakukan. Sampai hari ini tidak ada pengakuan terhadapnya. Cukup memusingkan mengapa sebagian besar bangsa Indonesia tidak pernah menunjukkan tanda terkejut berhadapan dengan kejahatan dan kejahatan sedemikian banyak warga sebangsa. Suharto dan kawan-kawannya membawa dosa itu ke kubur mereka. Tetapi mereka hanya dapat melakukannya karena merasa mendapat dukungan.

### **Situasi Menjelang G30S**

Kadang-kadang, terutama di luar negeri, kejahatan-kejahatan pasca G30S dibebankan begitu saja pada Angkatan Darat. Angkatan Darat yang mau menghancurkan PKI, dengan dukungan Amerika Serikat. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Penghancuran PKI mendapat dukungan luas dalam masyarakat. Suharto sendiri begitu mantap kekuasaannya karena dua alasan. Karean dengan Suharto mulai berkuasa keadaan ekonomis rakyat kecil – tentu kecuali mereka yang distigmatisasi sebagai “terlibat G30S/PKI” atau “tidak bersih lingkungan – menjadi lebih baik. Alasan kedua adalah bahwa Suharto dilihat sebagai pembebas dari ancaman PKI.

Ancaman PKI? Saya masih ingat betapa kami, frater-frater mahasiswa teologi di Yogyakarta, merasa gembira dan lega waktu pada tanggal 12 Maret 1966, sehari sesudah ia mengambil alih kekuasaan, Suharto melarang PKI. Mengapa bisa begitu?

Saya mau menceritakan sedikit dari pengalaman saya sendiri. Sejak mendarat di Bandara Kemayoran di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1961 saya sudah menjadi cemas dengan ancaman komunis di Indonesia. Saya mendapat kesan bahwa PKI maju di semua fron. Di mana-mana papan-papan merah PKI, BTI dll. terpasang dengan bangga. Sesudah NASAKOM dipermaklumkan oleh Presiden Sukarno - persatuan “revolusioner” “Nasionalisme, Agama dan Komunisme” - segenap ungkapan kritis terhadap komunisme dihantam sebagai “komunisto-fobi”. Akhir 1964 20

koran pembawa tulisan antikomunis Sayuti Melik a. n. “Badan Penyebar Sukarnoisme” ditutup. Partai Murba dinonaktifkan.

Pada 1965 bangsa Indonesia sebenarnya sudah terpecah dua. Yang mendukung NASAKOM, jadi yang pada hakekatnya mendukung bahwa Indonesia mengikuti jalan PKI, dan mereka yang tidak. PKI memakai suatu bahasa yang ekstrem keras-konfrontatif, masyarakat mereka bagi ke dalam kubu “progresif-revolusioner” (mereka yang pro-PKI-NASAKOM), yang lain dicacimaki sebagai antek Nekkolim. Bahasa PKI penuh ancaman. Mereka menyerukan pengganyangan para “kapbir” (kapitalis birokrat) dan “tujuh setan desa”, tak henti-hentinya PKI menghasut terhadap Masyumi dan PSI yang sudah dilarang Sukarno 1960, para pencetus Manifesto Kebudayaan 1963 dihantam habis-habisan (a. l. oleh Pramudya Ananta Tur yang memakai bahasa yang kasar sekali), dan hanya dua hari sebelum G30S Aidit menantang Presiden Soekarno sekali lagi untuk membubarkan HMI. Dan pada saat yang sama mereka yang diancam dan dihantam terus, suatu bagian besar dalam masyarakat, harus diam, mereka ingat pembunuhan-pembunuhan dalam peristiwa Madiun hanya 17 sebelumnya - yang waktu itu tidak dapat disebut-sebut. Pada saat Sukarno mengumandangkan NASAKOM rakyat Indonesia sudah terpecah ke dalam mereka yang merajalela dalam ruang publik dan mereka yang terpaksa diam.

Saya berpendapat bahwa suasana yang sampai pertengahan tahun 1965 diciptakan terutama oleh PKI sudah sedemikian konfrontatif sehingga tidak mungkin ditampung lagi dalam mekanisme pemecahan ketegangan yang secara tradisional tersedia dalam budaya-budaya Indonesia. Itu yang lalu terungkap sebagai “mereka atau kami”. Maka waktu G30S bertindak dan segera dihancurkan, segala rasa takut, rasa terancam, rasa tidak berdaya terhadap ancaman itu, ya kebencian terhadap PKI meledak bak bendungan yang bobol. Sekarang PKI-lah yang dihantam, dan apa pun yang berbau PKI. Bahwa Presiden Sukarno tidak mau melarang PKI masih memperkuat ledakan perasaan anti-PKI.

Tadi saya sebut kemungkinan bahwa konfrontasi keras yang dipanaskan oleh PKI barangkali melampaui kemampuan ditampung dalam budaya tradisional. Saya mau mengambil contoh dari wayang purwo Jawa. Dalam

kisah yang paling banyak dipertontonkan, kisah Mahabharata, pada hakekatnya para Pandawa berhadapan dengan para Kurawa. Para Pandawa merupakan inkarnasi kebaikan dan keluhuran jiwa, sedangkan para Kurawa merupakan pengejawantahan watak jahat dan rendah. Mahabharata mencapai puncaknya dalam perang Bharatayudha di mana segala kejahatan Kurawa akan dibalas dan semua 99 saudara Kurawa tewas. Dalam sekian *lakon* wayang segala macam tipe orang, kelakuan, kompromis, keanehan dan kelucuan muncul, tetapi makin malam pertunjukan maju, makin semuanya tertarik ke dalam suatu polarisasi dan konfrontasi antara yang jahat dengan yang baik. Dan dalam wayang tak ada belaskasihan dan pengampunan terhadap yang jahat. Segala kejahatan yang dilakukan pihak Kurawa akhirnya akan menerima pembalasan karmatik. Yang jahat harus dan akan dimusnahkan.<sup>4</sup> Bukannya orang Jawa tidak tahu bahwa di hati kebanyakan manusia yang baik dan yang jahat tercampur. Tetapi apabila satu pihak secara kolektif sudah dihayati sebagai ancaman dan jahat, maka situasi menjadi “mereka atau kami” dan “mereka” mesti dibunuh. Sebenarnya itu juga pesan yang diberikan oleh Kresna kepada Arjuna waktu Arjuna merasa berat hati harus berperang dengan para Kurawa yang masih saudara (pesan itulah yang di India meluas menjadi Baghavatgita). Bagi para penonton jelas bahwa pada akhirnya yang jahat, ya para Kurawa, harus musnah.<sup>5</sup> Apakah itu latar belakang kenyataan – yang bagi banyak kita begitu mengejutkan – bahwa sampai hari ini banyak orang tidak mengerti mengapa–kecuali dia simpatisan PKI – pembunuhan-pembunuhan itu dipersoalkan orang? PKI sudah dipersepsi sebagai pihak jahat, maka mereka akan dimusnahkan.

## **Bukan Rehabilitasi PKI**

Oleh karena itu, kalau kita mengharapkan agar bangsa Indonesia bersedia mengakui bahwa pembunuhan, penghancuran-penghancuran dan

4 Dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan B. R. O. G. Anderson, *Mythology and the Tolerance of the Javanese* (Ithaca N.Y.: Cornell University 1965); menurut Anderson wayang Jawa tidak pertamanya membedakan antara baik dan jahat, melainkan antara halus dan kasar. Tetapi menurut saya Anderson tertipu oleh permukaan kejadian-kejadian. Menurut saya wayang Jawa justru menempatkan segala-galanya – segala ambivalensi – ke dalam koordinat baik lawan jahat, di mana yang baik terwujud dalam Pandawa dan yang jahat dalam Kurawa dan tanda apakah seseorang baik atau buruk adalah sikapnya terhadap Semar.

5 Paling keras dalam lakon *Dursasana jambak*.

stigmatisasi terhadap mereka yang dicap pro-PKI (“terlibat”) merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang ekstrem, kita jangan mencampurkan itu dengan pertanyaan apakah PKI harus direhabilitasi. Tentu orang boleh menuntutnya, tetapi tuntutan itu bersifat politis dan tentang bagaimana PKI harus dinilai dan diperlakukan tak mungkin pernah akan tercapai kesepakatan. Maka tuntutan kemanusiaan dan etika bahwa para kurban pelanggaran berat hak-hak asasi manusia akhirnya mendapat keadilan jangan dicampur-adukkan dengan hal apakah PKI harus direhabilitasi atau tidak. Tidak mungkin diharapkan kesepakatan tentang rehabilitasi PKI. Fakta bahwa sesudah G30S terjadi pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak asasi orang-orang PKI tidak berarti bahwa keberatan-keberatan serius terhadap PKI tidak berdasar. Melainkan yang perlu kita sadari bersama adalah: Kalau pun PKI merupakan ancaman dan karena itu dianggap musuh, dan karena itu sesudah G30S diakhiri riwayatnya sebagai kekuatan politik di Indonesia, namun itu sama sekali tidak membenarkan bahwa orang-orang yang dekat dengan PKI, yang sama sekali tidak ada keterlibatan secuil pun dalam pembunuhan para jendral tanggal 1 Oktober 1965, kemudian diuber-uber, ditahan, diperkosa, dihancurkan eksistensinya, dicap pengkhianat, dan dibunuh.

### **Kurban Harus Diakui Sebagai Kurban**

Lalu apa? Bangsa lain pun ada yang mempunyai noda-noda dalam sejarahnya, misalnya bangsa Jerman. Minimal sekarang, 50 tahun kemudian, kita seharusnya berani berhenti berbohong. Berani mengakui bahwa selama 50 tahun kita dibohongi, termasuk membongkar kebohongan kotor dalam film “Pengkhianatan G30S/PKI” yang selama puluhan tahun meracuni hati bangsa. Dari kita betul-betul dituntut kebesaran hati untuk mengakui bahwa reaksi pasca-G30S sama sekali ke luar rel. Itu tuntutan keadilan paling dasar. Kalau akhirnya kita berani mengakui kengerian pelanggaran hak-hak asasi mereka yang dicap “terlibat” sesudah G30S, pengakuan itu tidak berarti bahwa PKI harus direhabilitasi. Dan sebaliknya, kalau banyak dari kita memandang PKI sebagai musuh yang dibenci dan ditakuti, maka itu tetap tidak membenarkan bahwa jutaan masyarakat yang tertarik pada PKI secara

sistematik dibunuh dan dihancurkan.

Langkah pertama adalah pengakuan para kurban pelanggaran kemanusiaan mengerikan pasca G30S itu sebagai kurban. Mereka yang dibunuh tanpa perkara pengadilan adalah kurban. Perlu diakui bahwa stigmatisasi dan penindasan terhadap mereka yang dicap “terlibat” sebagai pengkhianat atau sebagai simpatisan pengkhianatan bangsa merupakan ketidakadilan besar. Kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka perlu diakui kembali sepenuhnya. Itulah langkah paling pertama.

Dan jelas juga: Pengakuan kurban sebagai kurban hanya jujur kalau mereka,

dalam batas-batas kemungkinan, direhabilitasi dan diterimakan suatu ganti rugi (dan kepada mereka yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri perlu ditawarkan kemungkinan untuk kembali ke tanah air tanpa kesulitan birokratis). Sudah sangat mendesak agar para kurban mendapat keadilan.

Baru sesudah itu kita boleh minta maaf. Dan kita perlu menarik pelajaran dari pembunuhan dan penindasan yang dilakukan sebagai balas dendam sesudah G30S: Kita bersama-sama harus bertekad untuk tidak pernah mengizinkan lagi sekelompok orang dikucilkan dari solidaritas bangsa, lalu dibiarkan menjadi objek kebencian, kekerasan, dan barangkali pembunuhan hanya karena berbeda kepercayaan atau keyakinan politiknya.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, B. R. O. G. *Mythology and the Tolerance of the Javanese*. Ithaca N.Y.: Cornell University, 1965.
- Roosa, John. *Pretext for Mass Murder. The September 30<sup>th</sup> Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia*. Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 2006.